

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 berasal dari Wuhan negara Cina, yang tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. WHO menetapkan Covid-19 menjadi wabah pandemi global (Cucinotta dan Vanelli, 2020). Untuk mengurangi penyebaran Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan *social distancing*, pembatasan sosial berskala besar, dan penutupan beberapa sektor bisnis (Demirgüç-Kunt dkk., 2021). Pandemi Covid-19 tidak hanya menyebabkan krisis pada sektor kesehatan, tetapi juga krisis ekonomi (Ascarya, 2022).



Gambar 1. 1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan Gambar 1.1, pada tahun 2020 perekonomian di Indonesia terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi hingga angka -5,32% pada kuartal kedua dan -3,49% pada kuartal ketiga. Pembatasan aktivitas untuk mengurangi penyebaran Covid-19, juga akan berdampak pada menurunnya produksi, perdagangan internasional, pariwisata, dan banyak kegiatan ekonomi lainnya (Suryahadi dkk., 2020).

Sektor yang menjadi elemen penting dalam mendukung kepentingan ekonomi yang dapat memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan negara merupakan sektor perbankan (Abuzarqa and Tarnoczi, 2021). Ketidakpastian

pemulihan ekonomi dapat menimbulkan risiko yang cukup besar, terutama terhadap kesehatan dan kinerja keuangan perbankan (Dunbar, 2022). Bank dianggap sebagai mesin utama penggerak perekonomian dan kehidupan sosial. Selain bank konvensional, di Indonesia terdapat bank Syariah. Bank Syariah hadir sebagai jawaban dari kelompok ekonomi Islam dan praktisi perbankan muslim yang ingin menyediakan jasa transaksi keuangan sesuai dengan prinsip Syariah Islam, dan diharapkan menjadi solusi untuk menambah rasa kepercayaan masyarakat saat bertransaksi dengan merasa aman dan nyaman (Marimin and Romdhoni, 2017).

Bank Syariah menurut fungsinya terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, dan melakukan penyaluran dalam bentuk pembiayaan (Ismail, 2014:33-46). Dengan adanya bank Syariah, diharapkan dapat menampilkan kinerja lebih baik dibandingkan bank konvensional (Santosa dkk., 2020).

Berbeda dengan BUS dan UUS, BPRS merupakan Bank Syariah yang memiliki tujuan khusus untuk menyediakan layanan jasa dan produk perbankan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan yang rentan secara ekonomi (Ramadhan dkk., 2017). Di Indonesia sebagian besar rumah tangga miskin dan UMKM tidak terjangkau oleh layanan perbankan dan tidak memanfaatkan praktik pemberian pinjaman oleh bank, maka BPRS hadir sebagai solusi sebagai pemberi pembiayaan kepada pelaku usaha mikro (Priyadi dkk., 2021). KNKS (2019) menyatakan bahwa BPRS diharapkan tidak hanya menyediakan pembiayaan tetapi juga memberdayakan masyarakat kecil untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. BPRS tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan BPRS fokus menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM yang sangat berpotensi untuk menggerakkan perekonomian sektor riil dan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional (Naufal and Firdaus, 2017; Bahtiar, 2021).

Jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 65,46 juta unit dan mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja (Kemenkop UKM, 2021). Menurut survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kendala

dalam modal saat pandemi Covid-19. Sementara pada Oktober 2020 sesuai Laporan Pengaduan ke Kemenkop UKM, selama Covid-19 sebanyak 39,22% UMKM kesulitan dalam hal permodalan (Kemenkeu, 2021). Sedangkan menurut kajian dari Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan LPEM FEB UI, terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan sebesar 77% UMKM berkurang pendapatannya (Bayu, 2021). Kesulitan dalam hal permodalan dan pendapatan usaha UMKM yang berkurang juga dapat berdampak pada kinerja BPRS yang memberikan pembiayaan pada UMKM.

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara yang dituntut untuk memiliki kinerja yang baik (Hidayah, 2016). Jika bank mampu menjaga kinerjanya dengan baik, dan mampu manajemen risiko dalam kegiatan usahanya, maka prospek usaha dapat selalu tumbuh (Andriyani dkk., 2018). Kinerja keuangan merupakan alat ukur proses pelaksanaan sumberdaya keuangan pada suatu perusahaan. Dari kinerja keuangan, dapat dilihat keberhasilan dari suatu manajemen perusahaan dan seberapa besar perusahaan memberi manfaat kepada masyarakat (Surya dan Aisyah, 2020). Berikut kinerja keuangan BPRS dari tahun 2018 hingga 2021

Tabel 1. 1
Kinerja Keuangan BPRS Tahun 2018 – 2021

Rasio Keuangan	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
CAR	19,33%	17,99%	28,60%	23,79%
ROA	1,87%	2,61%	2,01%	1,73%
NPF	9,30%	7,05%	7,24%	6,95%
FDR	111,67%	113,59%	108,27%	103,38%
BOPO	87,66%	84,12%	87,62%	87,63%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2021)

Dari Tabel 1.1, dapat diketahui kinerja keuangan BPRS tiap tahunnya. Rasio kecukupan modal dihitung atau yang sering disebut sebagai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), memiliki nilai yang tergolong sangat sehat diatas 12%. Selanjutnya

rasio ROA diatas 1,5% yang tergolong sangat sehat. *Return on Asset* yang tinggi mengindikasikan tingkat produktivitas akan semakin meningkat (Anik dan Ningsih, 2020). Untuk rasio *Net Performing Financing* pada BPRS masih diatas batas yang telah ditentukan yaitu 5%. Jika suatu NPF bank tinggi, maka bank gagal dalam mengelola dana yang bank salurkan pada masyarakat untuk usaha dan mempengaruhi kinerja bank (Nugrohowati dan Bimo, 2019)

Financing to Deposit Ratio mengukur risiko likuiditas dengan membandingkan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar dana pihak ketiga yang dapat dihimpun, untuk FDR dari BPRS memiliki tren menurun setiap tahunnya. Semakin kecil presentase FDR menandakan bank dalam keadaan likuid (Anik dan Ningsih, 2020). Sedangkan untuk rasio BOPO yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, memiliki nilai yang fluktuatif tiap tahun.

Selain kinerja keuangan, salah satu tolak ukur kinerja BPRS adalah dengan mengukur tingkat efisiensinya (Fauzi, 2018). Efisiensi adalah salah satu parameter kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja suatu perusahaan (Ramadhan dkk., 2017). Dalam mengukur kinerja dari aktivitas suatu perusahaan dapat dilihat dari indikator efisiensi untuk mengukur sukses atau tidaknya suatu BPRS, dan mengetahui kemampuan BPRS dalam mengoptimalkan sumber daya BPRS (Septiani dan Rani, 2020). Setiap BPRS wajib memegang prinsip efisiensi agar bank dapat mempertahankan kinerjanya dengan mengoptimalkan *output* dan *input*nya. Bank yang efisien dapat mengurangi biaya, meningkatkan daya saingnya, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank, sehingga mengakibatkan tingkat keuntungan bank juga meningkat (Hersugondo dkk., 2021).

BPRS dituntut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan efisien dan efektif agar dapat bersaing pada pasar UMKM bersama dengan LKM lain dan bank umum yang mulai memiliki target pasar UMKM yang selama ini menjadi target pasar BPRS (Muhari and Hosen, 2014). Prinsip dasar efisiensi adalah menghindari segala bentuk pemborosan sumber daya (Laila dkk., 2018). Dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra' ayat 27 telah menjelaskan prinsip dasar efisiensi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا

Innal-mubazzirina kānū ikhwānasy-syayāṭīn, wa kānasy-syaiṭānu lirabbihī kafūrā
Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Allah telah berfirman dalam ayat diatas, bahwa Allah sangat mencela pembelanjaan harta secara boros, orang yang boros merupakan saudara setan. Membelanjkan harta dengan perilaku boros terjadi karena dorongan setan. Perilaku boros termasuk sifat setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada nikmat dan anugerah tuhan nya (Tafsir Kementrian Agama RI).

Salah satu pendekatan dalam mengukur efisiensi yaitu pendekatan *frontier*. Terdapat dua pendekatan *frontier* untuk mengukur efisiensi yaitu melalui pendekatan non parametrik meliputi *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan *Free Disopsal Hull* (FDH) dan pendekatan parametrik meliputi *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Distribution Free Approach* (DFA), dan *Thick Frontier Approach* (TFA) (Octrina dan Mariam, 2021). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah teknik *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengukur efisiensi operasional dengan mengidentifikasi batas praktik terbaik, dengan mengevaluasi kinerja unit pengambilan keputusan (DMU) terhadap praktik terbaik tersebut. (Haque dan Sohel, 2019)

Penelitian terkait efisiensi BPRS sebelum periode Covid-19 telah dilakukan antara lain oleh Fauzi, (2018) menganalisis BPRS pada provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016. Pada penelitian tersebut, efisiensi hanya terjadi pada 5 BPRS, dan inefisiensi pada 21 BPRS dalam waktu satu tahun atau lima tahun. Inefisiensi diakibatkan variabel *input* kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Jawa Tengah belum efisien. Sesuai data Statistik Perbankan Syariah 2021, pada tahun 2020-2021, kinerja BPRS di Indonesia masih belum optimal jika di bandingkan dengan BUS dan UUS. Hal ini ditunjukkan dari rasio NPF masih pada angka diatas 5% dan rasio ROA yang selalu menurun tiap tahun.

Penelitian ini mengambil objek pada BPRS di provinsi Jawa Timur karena tercatat sebagai provinsi dengan jumlah BPRS terbanyak ketiga pada tahun 2021, yaitu sebanyak 25 BPRS. Jumlah UMKM yang berada di Jawa Timur sebanyak

9.782.262. Menurut data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Koperasi dan UMKM memiliki kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 57,25% pada tahun 2020 (Dinas Koperasi UKM Jawa Timur, 2020). Selain itu, masih belum banyak penelitian yang melakukan penelitian efisiensi BPRS di Provinsi Jawa Timur pada periode Covid-19.

Hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti efisiensi BPRS di Provinsi Jawa Timur dengan metode *Data Envelopment Analysis* melalui pendekatan intermediasi untuk mengukur seberapa optimal tingkat *output* yang dihasilkan dari *input* yang diberikan. Dari latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2021**”.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Terdapat banyak penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai efisiensi lembaga keuangan Syariah. Salah satunya penelitian oleh oleh Hersugondo dkk., (2021) menghitung tingkat efisiensi menggunakan metode *Stochastic Frontier Approach (SFA)* dan membandingkan efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menggunakan *Independent sample T-test*. Variabel *input* yang digunakan yaitu biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan total aset, sedangkan *output* yaitu pembiayaan. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa tidak ada perbedaan nilai efisiensi pada BUS dan UUS. Penelitian lain oleh Cahyono dan Rani, (2017) dengan tujuan untuk menganalisis performa efisiensi teknis UUS BPD di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode DEA dengan variabel *input* biaya bunga, biaya personalia dan biaya operasional lain. Sedangkan variabel *output* yaitu pendapatan operasional lain dan pendapatan bunga. Hasil dari penelitian ini yaitu BPD Bangka Belitung inefisiensi sedangkan mayoritas BPD lain telah mencapai efisiensi yang baik.

Beberapa penelitian telah menganalisis efisiensi BPRS, salah satunya oleh Naufal dan Firdaus, (2017) meneliti tentang efisiensi BPRS wilayah Jabodetabek periode 2015-2016 menggunakan *Two Stage Data Envelopment Analysis*. Variabel *input* yang digunakan yaitu aset tetap, simpanan dan biaya operasional dan variabel *output* meliputi pembiayaan dan laba operasional. Dalam penelitian ini 12 BPRS

mengalami efisiensi fluktuatif setiap tahunnya. Selanjutnya CAR berpengaruh signifikan terhadap efisiensi BPRS yang dilakukan dengan uji regresi tobit. Sementara Fauzi, (2018) menganalisis BPRS pada provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016. Variabel *input* meliputi aset tetap, beban operasional, dana pihak ketiga, serta variabel *output* yaitu pembiayaan, pendapatan operasional. Pada penelitian ini, efisiensi terjadi pada 5 BPRS, dan inefisiensi pada 21 BPRS dalam waktu satu tahun atau lima tahun. Inefisiensi diakibatkan variabel *input* kurang maksimal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini membawa kebaruan yang terletak pada metode yang digunakan, periode penelitian, dan objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini membawa tahun terbaru 2020-2021 dengan mengambil objek 21 BPRS pada provinsi Jawa Timur. Pada penelitian terdahulu, masih belum banyak membahas efisiensi BPRS pada wilayah Jawa Timur pada saat periode pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020-2021. Selain itu metode pengukuran efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Dengan meninjau variabel pada penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan variabel *input* yaitu total pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), dan beban operasional. Sedangkan untuk variabel *output* menggunakan pendapatan operasional. Setiap penelitian terdahulu memiliki hasil pengukuran nilai efisiensi yang berbeda. Hal ini menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti kembali efisiensi BPRS di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini akan fokus untuk mengetahui apakah kinerja BPRS di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi yaitu 2020-2021 tergolong efisien sebagai dengan pendekatan intermediasi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui nilai efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2021.
2. Untuk mengetahui penetapan target potensi peningkatan efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2021.
3. Untuk mengetahui *benchmark* efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2021.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui efisiensi dari 21 BPRS di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2021. Data sekunder di peroleh dari laporan keuangan triwulanan BPRS yang di akses pada *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan intermediasi dengan orientasi output. Nilai efisiensi, penetapan target efisiensi, dan *benchmark* efisiensi didapatkan dengan mengolah data menggunakan *software* MaxDEA 8 Basic dengan bantuan Microsoft Access 2016. Analisis pengukuran menggunakan dua model yaitu *Charnes Cooper Rhodes* (CCR) dengan asumsi *Constant Return to Scale* (CRS) dan *Bankers Charnes Cooper* (BCC) dengan asumsi *Variable Return to Scale* (VRS). Variabel *input* yang digunakan dalam penelitian yaitu total pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), dan beban operasional. Sedangkan untuk variabel *output* menggunakan pendapatan operasional.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* dikarenakan peneliti ingin menganalisis efisiensi BPRS di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan nilai efisiensi yang berfluktuasi tiap triwulannya. Dengan menggunakan asumsi CRS dan asumsi VRS, BPRS di Jawa Timur belum memiliki nilai yang 100% efisien pada rentan periode penelitian. Rata-rata nilai efisiensi BPRS dengan asumsi CRS yaitu 0,66 dan VRS yaitu 0,71. Manajemen BPRS dapat meningkatkan efisiensinya dengan mengelola *input* dan *outputnya* secara optimal. Terdapat 8 BPRS yang menjadi *benchmark* BPRS yang belum efisien. BPRS yang inefisiensi dapat mengacu pada BPRS yang telah efisien sebagai *benchmark* untuk mencapai target efisien.

1.6 Kontribusi Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pada berbagai pihak. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas untuk berkoordinasi dalam menetapkan strategi untuk menjaga dan meningkatkan

efisiensi kinerja BPRS untuk menjaga perekonomian di Indonesia. Bagi Bank Pengkreditan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Timur, dapat menjadi bahan evaluasi efisiensi kinerja masing-masing BPRS. Sebagai sarana menetapkan strategi dan pengambilan kebijakan BPRS agar kinerja BPRS lebih efisien dan mendapat kepercayaan masyarakat. BPRS dapat mengetahui nilai efisiensi, penetapan target variabel, dan benchmark sebagai bahan evaluasi BPRS agar dapat mencapai efisien dikemudian hari. Bagi masyarakat dan investor, sebagai tambahan informasi terkait efisiensi kinerja BPRS agar kepercayaan masyarakat dan investor terhadap BPRS di Provinsi Jawa Timur bertambah. Selain itu, secara teoritis penelitian ini berkontribusi bagi akademisi, untuk referensi dan rujukan penelitian selanjutnya yang membahas tentang efisiensi kinerja perbankan Syariah. Penelitian ini menambah substansi teori yang ada dan penelitian sebelumnya.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, tujuan peneliti dalam melakukan penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi uraian teori yang menjadi acuan penelitian, penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode empiris, defisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan dalam penelitian ini berisi gambaran umum, deskripsi statistik variabel, hasil penelitian, dan interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang ringkasan hasil penelitian, kesimpulan penelitian, saran, dan keterbatasan penelitian.